



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

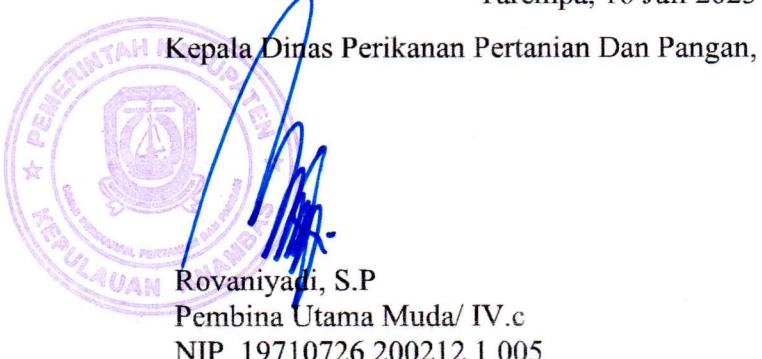


KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja yang akan datang. Semoga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat berguna dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program kerja khususnya di sektor perikanan, pertanian dan pangan.

Tarempa, 16 Juli 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	6
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	16
BAB IV PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	11
Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2025 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi

- pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan; sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
 5. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
 6. Program kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
 7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian dan pangan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan program perikanan, pertanian dan pangan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan, pertanian dan pangan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan, pertanian dan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idil, Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berpedoman pada hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk satu tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan hasil

- musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
 3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 12 Program dan 21 Kegiatan dengan anggaran Rp.12.585.993.889,29 ((Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah). Adapun Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 senilai Rp.4.050.820.311,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 32,19% dan realisasi fisik mencapai 39,84%. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi memiliki 1 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran senilai Rp.3.179.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.695.000 atau 53,31% dan realisasi Fisik sebesar 58,46%.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdapat 1 Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia senilai Rp.1.500 dengan realisasi Rp.0 atau 0% dan realisasi Fisik sebesar 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan salah satu kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mendukung hal tersebut. CPPD memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian. Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan

kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.

3. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Terdapat 1 Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia senilai Rp.400.000 dengan realisasi Rp.0 atau 0% dan realisasi Fisik sebesar 1,37%.

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.11.316.428.765,71 dan realisasi mencapai Rp.3.647.296.500 atau 32,23%. Dari realisasi keuangan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 6 bulan. Selain itu, pada kegiatan ini juga terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.151.480.000 dan realisasi mencapai Rp.34.540.000 atau 22,80%.

5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.54.968.000 dan realisasi mencapai Rp.6.728.000 atau 12,24%. Kegiatan ini merupakan honorarium untuk pengelola barang milik daerah.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 6 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 1.000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp.10.000.000 terealisasi senilai Rp.2.680.000 atau 26,80%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp.10.247.384 terealisasi senilai Rp.1.600.000 atau 15,61%, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.10.000.000 terealisasi senilai Rp.1.775.000 atau 17,75%, Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp.1000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.111.545.028,58 terealisasi senilai Rp.34.441.000 atau 30,88%.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp.1000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.200.000 terealisasi Rp.0 atau 0%, dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya dengan anggaran Rp.342.876.095 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp.41.612.000 terealisasi senilai Rp.27.006.620 atau 64,90%, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.50.516.445 terealisasi senilai Rp.8.875.000 atau 17,57%, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp.279.931.791 terealisasi senilai Rp.278.533.191 atau 99,50%.

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%

10. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan anggaran Rp.4.700.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan anggaran Rp.68.213.000 terealisasi senilai Rp.3.500.000 atau 5,13%.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil merupakan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan. Hal ini guna meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bermuara pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan kecil,

11. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

12. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.20.400.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.20.400.000 terealisasi 0%, dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%.

13. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan dengan realisasi fisik sebesar 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

14. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.2.150.000 terealisasi senilai Rp.2.150.000 atau 100% dan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

15. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran Rp.35.927.880. pada kegiatan ini belum tedapat realisasi keuangan.

16. Pengembangan Prasarana Pertanian

Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

17. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

18. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

19. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran Rp.25.000.000. pada kegiatan ini belum tedapat realisasi keuangan.

20. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

21. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanianterdiri atas 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp.3.000.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian dengan anggaran Rp.22.800.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian merupakan sub kegiatan pengampu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).

Tabel 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	Realisasi Keuangan s/d Triwulan II		Realisasi Fisik s/d Triwulan II
			Rp	%	%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.179.500	1.695.000	53,31	58,46
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3.179.500	1.695.000	53,31	58,46
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.179.500	1.695.000	53,31	58,46
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.500	-	0,00	3,53
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	3,53
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	3,53
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	400.000	-	0,00	1,37
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	400.000	-	0,00	1,37
3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	400.000	-	0,00	1,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.379.811.509	4.043.475.311	32,66	33,49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.467.908.766	3.681.836.500	32,11	48,11
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.316.428.765,71	3.647.296.500	32,23	49,55
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.480.000	34.540.000	22,80	46,67

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.968.000	6.728.000	12,24	33,33
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.968.000	6.728.000	12,24	33,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.794.413	40.496.000	28,56	29,03
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000	-	0,00	0,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	2.680.000	26,80	30,76
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.247.384	1.600.000	15,61	20,83
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	1.775.000	17,75	20,83
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000	-	0,00	0,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.545.028,58	34.441.000	30,88	43,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.077.095	-	0,00	5,55
13	Pengadaan Mebel	1.000	-	0,00	0,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000	-	0,00	8,33
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaLainnya	342.876.095	-	0,00	8,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.060.236	314.414.811	84,51	84,94
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.612.000	27.006.620	64,90	70,33
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.516.445	8.875.000	17,57	45,83
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.931.791	278.533.191	99,50	99,55

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000	-	0,00	0,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	-	0,00	0,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000	-	0,00	0,00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.913.000	3.500.000	4,80	25,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.913.000	3.500.000	4,80	25,00
22	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.700.000	-	0,00	25,00
23	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	68.213.000	3.500.000	5,13	25,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	40.803.000	-	0,00	0,00
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1.500	-	0,00	0,00
24	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.500	-	0,00	0,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	40.801.500	-	0,00	0,00
25	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000	-	0,00	0,00
26	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000	-	0,00	0,00
27	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.151.500	2.150.000	99,93	100,00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1.500	-	0,00	0,00

28	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1.500	-	0,00	0,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.150.000	2.150.000	100,00	100,00
29	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.150.000	2.150.000	100,00	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	35.927.880	-	0,00	0,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	35.927.880	-	0,00	0,00
30	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	35.927.880	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.000	-	0,00	0,00
	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.500	-	0,00	0,00
31	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	0,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.500	-	0,00	0,00
32	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.500	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25.001.500	-	0,00	29,16
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	0,00
33	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	0,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	-	0,00	29,16

34	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	25.000.000	-	0,00	29,16
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.500	-	0,00	0,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.500	-	0,00	0,00
35	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.500	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	25.800.000	-	0,00	33,33
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	25.800.000	-	0,00	33,33
36	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.000.000	-	0,00	33,33
37	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian	22.800.000	-	0,00	33,33
TOTAL		12.585.993.889,29	4.050.820.311	32,19	39,84

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Adapun matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 yang berisikan rekapitulasi rumusan program dan kegiatan: perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan 12 Program dan 21 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.12.585.993.889,29 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).

Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Kute Siantan dan di Kecamatan Siantan Selatan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRANA CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN							21.448.632.327,00	22.922.919.100,00	12.585.993.889,29	-8.862.638.437,71													21.835.804.764,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.000.000,00	208.393.531,00	3.581.000,00	-221.419.000,00										30.000.000,00					
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							225.000.000,00	208.393.531,00	3.581.000,00	-221.419.000,00										30.000.000,00					
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan				84 %	84 %	74.911.100,00	80.265.700,00	3.179.500,00	25.088.900,00										100.000.000,00					
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.911.100,00	80.265.700,00	3.179.500,00	-71.731.600,00										100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN				
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																					100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						1 Laporan	1 Laporan	74.911.100,00	80.265.700,00	3.179.500,00	-71.731.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah								100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan				56 %	56 %	122.574.400,00	113.567.931,00	1.500,00	27.425.600,00											150.000.000,00				
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	122.574.400,00	113.567.931,00	1.500,00	-122.572.900,00											150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																					150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	122.574.400,00	113.567.931,00	1.500,00	-122.572.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah								150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan				80 %	80 %	27.514.500,00	14.559.900,00	400.000,00	22.485.500,00											50.000.000,00				
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar				100 %	100 %	27.514.500,00	14.559.900,00	400.000,00	-27.114.500,00											50.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																					50.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.514.500,00	14.559.900,00	400.000,00	-27.114.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah								50.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							21.223.632.327,00	22.714.525.569,00	12.582.412.889,29	-8.641.219.437,71											21.535.804.764,00				
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERTANIAN							20.077.637.043,00	21.457.166.655,00	12.495.679.009,29	-7.581.958.033,71											19.977.254.764,00				
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	14.024.902.843,00	14.632.032.455,00	12.379.811.509,29	241.951.921,00											14.266.854.764,00				
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan dinas				100 %	100 %	8.993.694.493,00	13.446.549.616,00	11.467.908.765,71	2.474.214.272,71											9.006.136.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					8.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	8.797.374.493,00	13.204.389.616,00	11.316.428.765,71	2.519.054.272,71	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah									8.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		196.320.000,00	242.160.000,00	151.480.000,00	-44.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			206.136.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase pelayanan Administrasi BMD				100 %	100 %		43.800.000,00	40.368.000,00	54.968.000,00	11.168.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		45.990.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																					
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan		43.800.000,00	40.368.000,00	54.968.000,00	11.168.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.990.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Percentase pelayanan kepegawaiyan				100 %	100 %		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pelayanan administrasi umum				100 %	100 %		497.042.900,00	460.131.473,00	141.794.412,58	-355.248.487,42			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		500.895.045,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		6.479.000,00	6.479.000,00	1.000,00	-6.478.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			6.802.950,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		28.093.100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-18.093.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			29.497.755,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket		43.448.400,00	20.000.000,00	10.247.384,00	-33.201.016,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.620.820,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		50.000.000,00	43.652.473,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			52.500.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan		18.692.400,00	3.880.000,00	1.000,00	-18.691.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			19.627.020,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan		330.330.000,00	376.120.000,00	111.545.028,58	-218.784.971,42	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			346.846.500,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersedianya BMD			100 %	100 %	369.269.978,00	472.556.504,00	343.077.095,00		-26.192.883,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		387.733.476,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					2 Unit	2 Unit	13.930.701,00	64.974.183,00	1.000,00	-13.929.701,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			14.627.236,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	10.063.182,00	64.706.226,00	200.000,00	-9.863.182,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			10.566.341,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	345.276.095,00	342.876.095,00	342.876.095,00	-2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			362.539.899,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda			100 %	100 %	4.058.299.671,00	163.220.490,00	372.060.236,00	-3.686.239.435,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		4.261.214.654,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN				
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	118.049.410,00	112.704.045,00	41.612.000,00	-76.437.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			123.951.880,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	50.516.445,00	50.516.445,00	50.516.445,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			53.042.267,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	3.889.733.816,00	0,00	279.931.791,00	-3.609.802.025,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			4.084.220.507,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan BMD			100 %	100 %	61.795.801,00	49.206.372,00	3.000,00	-61.792.801,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		64.885.589,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN				
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	13.822.515,00	13.822.515,00	1.000,00	-13.821.515,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			14.513.640,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	15.383.857,00	15.383.857,00	1.000,00	-15.382.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			16.153.049,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN			
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit		32.589.429,00	20.000.000,00	1.000,00	-32.588.429,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			34.218.900,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			5 %	5 %		3.712.734.200,00	5.022.734.200,00	72.913.000,00	-502.734.200,00							3.210.000.000,00			
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi			16 Kelompok	16 Kelompok		3.712.734.200,00	5.022.734.200,00	72.913.000,00	-3.639.821.200,00			Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas		3.210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya			160 Orang	160 Orang		3.642.734.200,00	4.952.734.200,00	4.700.000,00	-3.638.034.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dilayani Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			16 Kelompok	16 Kelompok		70.000.000,00	70.000.000,00	68.213.000,00	-1.787.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Genting Putul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya			65 %	65 %		2.020.000.000,00	1.570.000.000,00	40.803.000,00	150.400.000,00							2.170.400.000,00			
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dibina			30 Kelompok	30 Kelompok		1.220.000.000,00	920.000.000,00	1.500,00	-1.219.998.500,00			Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pembudidaya Ikan		1.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			30 Kelompok	30 Kelompok		1.220.000.000,00	920.000.000,00	1.500,00	-1.219.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			1.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	1 Dokumen		0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah		20.400.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit		100.000.000,00	50.000.000,00	20.400.000,00	-79.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit		700.000.000,00	600.000.000,00	1.500,00	-699.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			750.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Pengolahan Perikanan			83.30 %	83.30 %		320.000.000,00	232.400.000,00	2.151.500,00	10.000.000,00							330.000.000,00			
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran			200 Dokumen	200 Dokumen		143.298.800,00	31.972.000,00	1.500,00	-143.297.300,00			Mempertajamkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		200 Dokumen	200 Dokumen	143.298.800,00	31.972.000,00	1.500,00	-143.297.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				150.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan		100 %	100 %	176.701.200,00	200.428.000,00	2.150.000,00	-174.551.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas			180.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	176.701.200,00	200.428.000,00	2.150.000,00	-174.551.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				180.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.145.995.284,00	1.257.358.914,00	86.733.880,00	-1.059.261.404,00								1.558.550.000,00							
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase Penyediaan Sarana Pertanian			80 %	80 %	448.995.284,00	551.358.914,00	35.927.880,00	1.004.716,00									450.000.000,00						
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	448.995.284,00	551.358.914,00	35.927.880,00	-413.067.404,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Petani, Pekebun, Peternak			450.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1 Dokumen	1 Dokumen	448.995.284,00	551.358.914,00	35.927.880,00	-413.067.404,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				450.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase Penyediaan Prasarana Pertanian			88,20 %	88,20 %	626.000.000,00	435.000.000,00	3.000,00	14.000.000,00									640.000.000,00						
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan			1 Unit	1 Unit	201.000.000,00	30.000.000,00	1.500,00	-200.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas			210.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B			1 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000,00	30.000.000,00	1.500,00	-200.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				210.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian			1 Unit	1 Unit	425.000.000,00	405.000.000,00	1.500,00	-424.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Petani, Pekebun, Peternak			430.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	425.000.000,00	405.000.000,00	1.500,00	-424.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				430.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESЕHATAN MASYARAKAT VETERINER	Percentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet			86 %	86 %	30.000.000,00	230.000.000,00	25.001.500,00	370.000.000,00									400.000.000,00						
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penjaminan kesehatan hewan			1300 Ekor	1300 Ekor	15.000.000,00	15.000.000,00	1.500,00	-14.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Peternak, pengguna jasa medik veteriner			300.000.000,00		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan		15.000.000,00	15.000.000,00	1.500,00	-14.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner				1 Laporan	1 Laporan		15.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Peternak, pengguna jasa medik veteriner		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1 Laporan	1 Laporan		15.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00								100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			75 %	75 %		26.000.000,00	26.000.000,00	1.500,00	4.000.000,00									30.000.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan				85 %	85 %		26.000.000,00	26.000.000,00	1.500,00	-25.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																				30.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani			95 %	95 %		15.000.000,00	15.000.000,00	25.800.000,00	23.550.000,00									38.550.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				12 Kali	12 Kali		15.000.000,00	15.000.000,00	25.800.000,00	10.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Kelompok Tani		38.550.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																				15.750.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																				22.800.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	5 Orang		0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah				21.835.804.764,00	
		J U M L A H							21.448.632.327,00	22.922.919.100,00	12.585.993.889,29	-8.862.638.437,71										

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir perubahan Renja merupakan suatu dokumen perencanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan ini merupakan hasil kerja dari semua pihak dan dari berbagai sektor serta tentunya dukungan dari masyarakat serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petani dan masyarakat umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Semoga dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja ini dapat menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,



Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005